



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUN-
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978. ✓

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

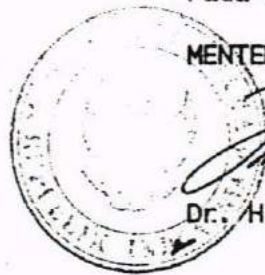
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



R. H. Tarmizi Taher
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia; ✓
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia; ✓
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi; ✓
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

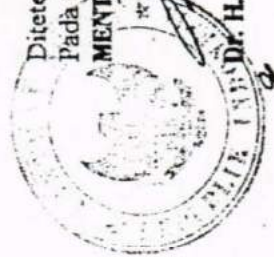
NO	PEMERINTAH	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DAIR	KAB./KOTA	KET.
		URUT	MAD				
136	13 Kalimantan Selatan	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Balenrejo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Balenrejo Kec. Balen	Kab. Bojonegoro		
137		25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngronggot	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Ngronggot	Kab. Nganjuk		
138		26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jati Baron	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Jati Baron	Kab. Nganjuk		
139		27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cangkringan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Cangkringan	Kab. Nganjuk		
140		28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojorejo Wates Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Mojorejo	Kab. Blitar		
141		29	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalipare	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Kalipare Jl. Kelud No.130 Ds. Arjowilangun Kec. Kalipare, Kab. Malang	Kab. Malang		
142		30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Socolor	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Socolor	Kab. Bondowoso		
143		31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Karang	Kab. Bondowoso		
144		32	Madrasah Ibtidaiyah Negeri di T. Pacinan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di T. Pacinan	Kab. Situbondo		
145		33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojosari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Mojosari	Kab. Situbondo		
146		34	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Sumber Banjar	Kab. Lamongan		
147		1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Thaibah Raya	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Darul Imad Jl. Kuba Sari No. 2 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar	Kab. Banjar		
148		2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barabai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial An Najah Jl. Sari Cading Kec. Barabai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah		

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KETERANGAN
		URUT	MAD				
11	Kalimantan Selatan	38	15	Madrasah Aliyah Negeri Kauman	Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Filial di Kauman	Kab. Jombang	
		39	1	Madrasah Aliyah Negeri 4 Barabai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pantai Hambawang, Jl. Puspa Nyindra Desa Pantai Hambawang Timur Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
12	Kalimantan Barat	40	1	Madrasah Aliyah Negeri Singkawang	Madrasah Aliyah Negeri I Pontianak Filial Singkawang Kab. Sambas	Kab. Sambas	
13	Sulawesi Selatan	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Utara	Madrasah Aliyah Negeri Tanete Filial di Sinjai Jl.A.Mandasin No.2 Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
14	Maluku	42	2	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Timur	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sinjai Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		43	1	Madrasah Aliyah Negeri Galela	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Galela	Kab. Maluku Utara	
		44	2	Madrasah Aliyah Negeri Sanana	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Sanana	Kab. Maluku Utara	

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERILAGAMA REPUBLIK INDONESIA



DR. H. TARMIZI TAHER



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

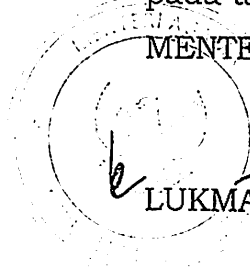
KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

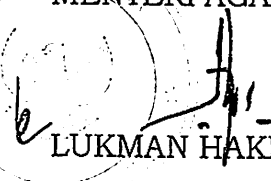
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

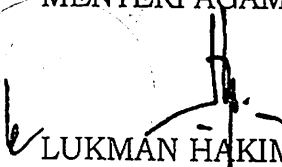
DAFTAR PERUBAHAN NAMA 145 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Timur	MIN Tulakan	MIN 1 Pacitan
2	Jawa Timur	MIN Bungur	MIN 2 Pacitan
3	Jawa Timur	MIN Sidoarjo	MIN 3 Pacitan
4	Jawa Timur	MIN Kalak	MIN 4 Pacitan
5	Jawa Timur	MIN Wonokarto	MIN 5 Pacitan
6	Jawa Timur	MIN Bogem Sampung	MIN 1 Ponorogo
7	Jawa Timur	MIN Lengkong Sukorejo	MIN 2 Ponorogo
8	Jawa Timur	MIN Janti	MIN 3 Ponorogo
9	Jawa Timur	MIN Bangunrejo	MIN 4 Ponorogo
10	Jawa Timur	MIN Mlarak	MIN 5 Ponorogo
11	Jawa Timur	MIN Paju	MIN 6 Ponorogo
12	Jawa Timur	MIN Winong	MIN 7 Ponorogo
13	Jawa Timur	MIN Prigi	MIN 1 Trenggalek
14	Jawa Timur	MIN Kayen Karangan	MIN 2 Trenggalek
15	Jawa Timur	MIN Tunggangri	MIN 1 Tulungagung
16	Jawa Timur	MIN Jeli Karangrejo	MIN 2 Tulungagung
17	Jawa Timur	MIN Pandansari (MIN Dukuh Jati Ngunut)	MIN 3 Tulungagung
18	Jawa Timur	MIN Pucung Ngantru	MIN 4 Tulungagung
19	Jawa Timur	MIN Rejotangan	MIN 5 Tulungagung
20	Jawa Timur	MIN Ngepoh	MIN 6 Tulungagung
21	Jawa Timur	MIN Mergayu	MIN 7 Tulungagung
22	Jawa Timur	MIN Bulurejo	MIN 1 Lumajang
23	Jawa Timur	MIN Lempeni	MIN 2 Lumajang
24	Jawa Timur	MIN Locare	MIN 1 Bondowoso
25	Jawa Timur	MIN Kerang	MIN 2 Bondowoso

97	Jawa Timur	MIN Konang	MIN 1 Pamekasan
98	Jawa Timur	MIN Sana Daya Waru	MIN 2 Pamekasan
99	Jawa Timur	MIN Teratai Pandian	MIN 1 Sumenep
100	Jawa Timur	MIN Tanjung I Kolor	MIN 2 Sumenep
101	Jawa Timur	MIN Tanjung Saronggi	MIN 3 Sumenep
102	Jawa Timur	MIN Semampir	MIN 1 Kota Kediri
103	Jawa Timur	MIN Bandar Kidul	MIN 2 Kota Kediri
104	Jawa Timur	MIN Malang I	MIN 1 Kota Malang
105	Jawa Timur	MIN Malang 2	MIN 2 Kota Malang
106	Jawa Timur	MIN Mandaranrejo	MIN 1 Kota Pasuruan
107	Jawa Timur	MIN Bugul Kidul	MIN 2 Kota Pasuruan
108	Jawa Timur	MIN Kertoharjo Demangan	MIN 1 Kota Madiun
109	Jawa Timur	MIN Manis Rejo	MIN 2 Kota Madiun
110	Jawa Timur	MIN Medokan Ayu	MIN 1 Kota Surabaya
111	Jawa Timur	MIN Jambangan Wonocolo	MIN 2 Kota Surabaya
112	Jawa Timur	MIN Sobo	MIN 1 Banyuwangi
113	Jawa Timur	MIN Songgon	MIN 2 Banyuwangi
114	Jawa Timur	MIN Jajag Gambiran	MIN 3 Banyuwangi
115	Jawa Timur	MIN Olak Alen	MIN 1 Blitar
116	Jawa Timur	MIN Kunir	MIN 2 Blitar
117	Jawa Timur	MIN Mojorejo Wates	MIN 3 Blitar
118	Jawa Timur	MIN Ngaringan Gandusari	MIN 4 Blitar
119	Jawa Timur	MIN Umbul Damar Binangun	MIN 5 Blitar
120	Jawa Timur	MIN Pojok Ponggok	MIN 6 Blitar
121	Jawa Timur	MIN Purwokerto Srengat	MIN 7 Blitar
122	Jawa Timur	MIN Sidorejo Ponggok	MIN 8 Blitar
123	Jawa Timur	MIN Slemanan Udanawu	MIN 9 Blitar
124	Jawa Timur	MIN Sukosewu Gandusari	MIN 10 Blitar
125	Jawa Timur	MIN Sumberjati Kademangan	MIN 11 Blitar
126	Jawa Timur	MIN Sumberjo Sanan Kulon	MIN 12 Blitar
127	Jawa Timur	MIN Tegalasri Wlingi	MIN 13 Blitar
128	Jawa Timur	MIN Tegalasri Wlingi	MIN 14 Blitar
129	Jawa Timur	MIN Arjasa	MIN 1 Jember
130	Jawa Timur	MIN Tutul Balung	MIN 2 Jember
131	Jawa Timur	MIN Summersari	MIN 3 Jember

132	Jawa Timur	MIN Gerahan	MIN 4 Jember
133	Jawa Timur	MIN Sempolan	MIN 5 Jember
134	Jawa Timur	MIN Tanggul Wetan	MIN 6 Jember
135	Jawa Timur	MIN Kanigoro	MIN 1 Kediri
136	Jawa Timur	MIN Doko Gampangrejo	MIN 2 Kediri
137	Jawa Timur	MIN Plosolor	MIN 3 Kediri
138	Jawa Timur	MIN Klagen Serut	MIN 1 Madiun
139	Jawa Timur	MIN Bancong Wonoasri	MIN 2 Madiun
140	Jawa Timur	MIN Rejosari	MIN 3 Madiun
141	Jawa Timur	MIN Doho Dolopo	MIN 4 Madiun
142	Jawa Timur	MIN Donomulyo (MIN Kab. Malang)	MIN 1 Malang
143	Jawa Timur	MIN Druju Sumber Manjing Wetan	MIN 2 Malang
144	Jawa Timur	MIN Kalipare	MIN 3 Malang
145	Jawa Timur	MIN Gedog (MIN Gedon Garun)	MIN Kota Blitar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN